

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
PROGRAM BANTUAN SOSIAL (BANSOS) TERHADAP
PENANGGULANGAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI
*COVID-19***

SKRIPSI

Oleh:

Ginda Cahyani Sukmawati

201810115121



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Dalam Program
Bantuan Sosial (Bansos) Terhadap Penanggulangan
Ekonomi Akibat Pandemi *Covid-19*

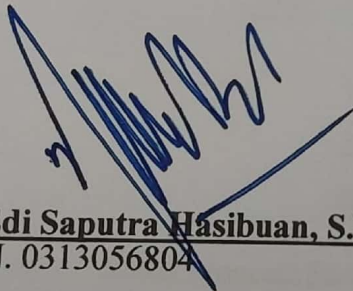
Nama Mahasiswa : Ginda Cahyani Sukmawati

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115121

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

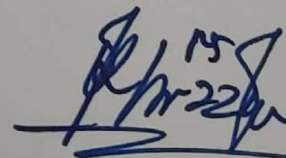
Bekasi, 2022
MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., MH
NIDN. 0313056804

Pembimbing II



Rabiah Al-Adawiah, S.Ag., Msi
NIDN. 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Dalam Program Bantuan Sosial (Bansos) Terhadap Penanggulangan Ekonomi Akibat Pandemi *Covid-19*
Nama Mahasiswa : Ginda Cahyani Sukmawati
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115121
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Oktober 2022

Bekasi, 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Rahman Amin, S.H., MH
NIDK. 8802323419

Penguji I : Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIDN. 0322078304

Penguji II : Rabiah Al-Adawiah, S.Ag., M.Si
NIDN. 0324037202

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ginda Cahyani Sukmawati
NPM : 201810115121
TTL : Bekasi, 09 Maret 1999
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Program Bantuan Sosial (Bansos) Terhadap Penanggulangan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi,

2022

Yang membuat pernyataan,



Ginda Cahyani Sukmawati

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ginda Cahyani Sukmawati
NPM : 201810115121
TTL : Bekasi, 09 Maret 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PROGRAM BANTUAN SOSIAL (BANSOS) TERHADAP PENANGGULANGAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID-19**

Berserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas *royalty* non- eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, Oktober 2022
saya buat pernyataan,



Ginda Cahyani Sukmawati

ABSTRAK

Ginda Cahyani Sukmawati. 201810115121. Pertanggung jawaban Pidana dalam Program Bantuan Sosial (BANSOS) Terhadap Penanggulangan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19

Covid-19 merupakan sebuah virus yang hingga saat ini masih meresahkan masyarakat khususnya Rakyat Indonesia. Kasus ini muncul pertama kali tepatnya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok hingga menyebar ke berbagai provinsi di seluruh Negara China dan pada akhirnya penyebaran virus tersebut mulai tersebar luas hingga ke seluruh negara di dunia. Penyebaran virus Coronavirus pada manusia dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang lebih serius. Menurut Cable News Network (CNN) Indonesia jumlah kasus Coronavirus di Indonesia per Senin 24 Agustus 2020 sudah tercatat mencapai 155.412 orang. Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada warga yang membutuhkan, tentu memerlukan dana yang besar. Namun, dana tersebut kerap tidak sepenuhnya sampai ke tangan masyarakat, melainkan menjadi ajang korupsi. Tidak hanya menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara, pemotongan dana bansos bagi masyarakat ternyata kerap dilakukan oleh pemerintah wilayah setempat. Ketua Rukun Warga 05 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok mengakui melakukan pemotongan dana BST yang diterima warga dari pemerintah pusat. Besar potongan bansos tunai itu Rp 50 ribu dari total dana Rp 600 ribu.

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan hukum terhadap Pelanggaran Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), dan Pemberatan Hukum dalam Pertanggung jawaban Pidana dalam Kasus Pelanggaran Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutpaut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sumber bahan penelitian terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan bahan hukum yaitu studi kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data terdapat 2 (dua) yaitu wawancara dan studi dokumen.

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kata kunci: coronavirus, pelanggaran penyaluran bantuan sosial, pertanggungjawaban dan sanksi bagi pelaku korupsi.

ABSTRACT

Ginda Cahyani Sukmawati. 201810115121. *Responsible for the Criminal in the Social Assistance Program (BANSOS) Against Economic Countermeasures Due to the Covid-19 Pandemic*

Covid-19 is a virus that is still troubling the public, especially the people of Indonesia. This case appeared for the first time precisely in the city of Wuhan, Hubei Province, China until it spread to various provinces throughout China and in the end the spread of the virus began to spread widely to all countries in the world. The spread of the Coronavirus in humans can cause respiratory tract infections, ranging from the common cold to more serious illnesses. According to Cable News Network (CNN) Indonesia, the number of coronavirus cases in Indonesia as of Monday, August 24, 2020, has reached 155,412 people. Social Assistance (Bansos) which is aimed at people in need, of course requires large funds. However, these funds often do not fully reach the people, but become an arena for corruption. Not only ensnaring the Minister of Social Affairs, Juliari Batubara, the local government has often cut social assistance funds for the community. The head of the 05 Residents Association of Beji Village, Beji District, Depok City admitted that he had cut the BST funds received by residents from the central government. The amount of the cash assistance discount is Rp. 50 thousand from the total fund of Rp. 600 thousand.

The aim this research is to describe the law on Violations of the Distribution of Social Assistance (Bansos), and identify and describe the Legal Weights in Criminal Liability in Cases of Violations of the Distribution of Social Assistance (Bansos). This research uses normative-empirical research. The approach used by the author in this study is the Statute Approach, which is an approach that is carried out by examining all laws and regulations related to the legal issues being handled. Sources of research materials consist of primary and secondary legal sources. The data collection method used by the author to collect legal materials is library research, data collection techniques in normative legal research are carried out by literature studies on legal materials, in empirical legal research, there are 2 (two) data collection techniques, namely interviews and document studies.

Any person who, with the aim of benefiting himself or another person or a corporation, abuses the authority, opportunities or facilities available to him because of a position or position that can harm the state finances or the state economy, shall be sentenced to life imprisonment or a minimum imprisonment of 1 (one) year and a maximum of 20 (twenty) years and or a fine of at least Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

Keywords: *coronavirus, violations in the distribution of social assistance, accountability and witness for corruption perpetrators*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan memanjatkannya dengan senantiasa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang atas segala arah dan jalan serta rahmat dan karunia sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah ***“Pertanggungjawaban Pidana Dalam Program Bantuan Sosial (Bansos) Terhadap Penanggulangan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19”***.

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Edi Saputra, SH., MH, selaku pembimbing Materi penulis serta Ibu Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si selaku dosen pembimbing Teknis yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan dan membantu penulis walaupun dalam keadaan pandemik *Covid-19* seperti ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak Makpudin dan Ibu Ninik Purwati, selaku orang tua penulis yang tidak hanya menguliahkan anaknya tetapi memberikan support dan motivasi kepada penulis agar sukses dimasa depannya dan penulis mengucapkan terima kasih karena telah membesarkan anaknya ini menjadi seperti saat ini serta memberikan do'a kepada anak-anaknya.

8. Seluruh keluarga besar dari ibu dan bapak yang telah memberikan dukungan materil dan immateril kepada penulis.
9. Seluruh teman B1 Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Seluruh teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, November 2022



Ginda Cahyani Sukmawati
201810115121

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Tujuan Penelitian	8
1.4.2. Manfaat Penelitian	8
1.5. Kerangka Teoretis	9
1.7. Kerangka Pemikiran.....	13
1.8. Sistematika penulisan.....	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Tindak Pidana	16
2.1.1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	16
2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana	19
2.1.3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	24

2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	27
2.2.1. Pengertian Korupsi	27
2.2.2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi	28
2.3. Bantuan Sosial.....	34
2.3.1. Pengertian Bantuan Sosial	34
2.3.2. Pertanggungjawaban Pengguna Dana Bantuan Sosial	38
BAB III. METODE PENELITIAN	40
3.1. Metode Penelitian	40
3.1.1. Jenis Penelitian	40
3.1.2. Sumber Bahan Hukum.....	41
3.1.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	42
3.1.4. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	42
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor : 18/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)	43
4.1.1. Bentuk Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial.	43
4.1.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial.....	53
4.2. Sanksi Bagi Pejabat Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan sosial	58
4.3. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial dalam Perkara Putusan Nomor: 18/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Makassar.....	68
BAB V. PENUTUP	100
5.1. Simpulan	79
5.2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
APBD/ APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BANSOS	Bantuan Sosial
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPKAD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara
BULOG	Badan Usaha Logistik
CNN	<i>Cable News Network</i>
KKN	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KEJARI	Kejaksaan Negeri
NIK	Nomor Induk Kependudukan
PERMENDAGRI	Peraturan Menteri Dalam Negeri
SARS	<i>Severe Acute Respiratory Syndrome</i>
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPTJM	Surat Pertanggungjawaban Mutlak
WHO	<i>World Health Organization</i>
UU TIPIKOR	Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi



MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTO

jangan malas, kamu rajin saja
belum tentu ada yang mau

HALAMAN PERSEMBAHAN

“ Skripsi ini saya persembahkan untuk Ibu Ninik Purwati dan Bapak Makpudin yang telah membersarkan anaknya ini, memberikan doa, dukungan agar menjadi anak yang berguna bagi keluarganya, dan menjadi anak yang selalu patuh dan menghormati orang tua serta merasakan kebersyukuran dalam hidupnya. ”

